

1-2013

Faktor Politik dalam Alokasi Dana Antarpemerintah Indonesia

M. Syareza L. Tobing

Badan Koordinasi Penanaman Modal, syarezatobing@gmail.com

Bambang P. S. Brodjonegoro

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, brodjo@indo.net.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jepi>



Part of the [Economics Commons](#)

Recommended Citation

Tobing, M. Syareza L. and Brodjonegoro, Bambang P. S. (2013) "Faktor Politik dalam Alokasi Dana Antarpemerintah Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*: Vol. 13: No. 2, Article 3.
DOI: 10.21002/jepi.v13i2.03

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jepi/vol13/iss2/3>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Economics & Business at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Faktor Politik dalam Alokasi Dana Antarpemerintah Indonesia *Political Factors of Intergovernmental Transfers In Indonesia*

M. Syareza L. Tobing^{a,*}, Bambang P. S. Brodjonegoro^{b,**}

^a*Badan Koordinasi Penanaman Modal*

^b*Kementerian Keuangan Republik Indonesia*

Abstract

The intergovernmental transfer system currently applied in Indonesia is intended to prevent the intervention of political powers. However, there are indications of political determinants behind central government transfers to sub-national governments. In order to prove the existence of these political factors, this research utilizes empirical panel data models of *Dana Alokasi Umum* (DAU), *Dana Dekonsentrasi* and *Tugas Pembantuan* using political variables. Results show that while there are no significant political variables in the DAU and *Dana Dekonsentrasi* models, there is a political determinant behind the amount of *Dana Tugas Pembantuan*, where a higher seat share for the Golkar party representing a province in the national parliament will entitle the province to a relatively higher share of the *Dana Tugas Pembantuan*.

Keywords: Political Economics, Fiscal Decentralization, *Dana Alokasi Umum*, *Dana Dekonsentrasi* and *Tugas Pembantuan*

Abstrak

Sistem transfer antarpemerintah di Indonesia dibuat dengan tujuan mencegah campur tangan politik terhadap sistem transfer pemerintah. Namun begitu, terdapat indikasi keberadaan determinan politik dalam menentukan transfer pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Untuk membuktikan keberadaan faktor-faktor politik tersebut, digunakan model data panel yang berusaha menunjukkan determinan politik pada Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Hasil studi menemukan bahwa tidak ada campur tangan politik dalam menentukan transfer DAU dan Dana Dekonsentrasi, namun ditemukan determinan politik pada Dana Tugas Pembantuan, di mana provinsi yang memiliki proporsi kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Partai Golkar yang lebih tinggi mendapatkan Dana Tugas Pembantuan yang lebih besar.

Kata kunci: Ekonomi Politik, Desentralisasi Fiskal, Dana Alokasi Umum, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

JEL classifications: D72, E6

Pendahuluan

Menurut Francis (2012), sistem keuangan antarpemerintah yang sedang diterapkan di Indonesia pada saat ini merupakan salah satu sis-

tem yang paling rumit yang pernah diterapkan di dunia. Fokus utama dari sistem yang ada sekarang adalah memenuhi kecukupan pengeluaran dari pemerintah provinsi dan lokal dengan menggunakan sebuah kriteria yang objektif. Hal ini dilakukan untuk memastikan kecukupan pendapatan daerah dan juga otonomi lokal masing-masing daerah. Namun sayangnya, sistem tersebut tidak memiliki transpa-

*Alamat Korespondensi: Jl. Ciasem IV No. 16 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. *E-mail:* syarezatobing@gmail.com.

***E-mail:* brodjo@indo.net.id.

ransi maupun akuntabilitas yang jelas terhadap penduduk lokal terkait kinerja pelayanan publik.

Sistem kompleks yang digunakan pemerintah pusat dilaksanakan dengan menggunakan sebuah fondasi akademis dan prosedur yang rumit. Kompleksitas ini adalah hasil dari keinginan pemerintah pusat untuk menciptakan pembagian pendapatan yang seadil-adilnya bagi seluruh lapisan pemerintahan. Lebih penting lagi, diharapkan bahwa sistem ini dapat mencegah campur tangan politik terhadap sistem transfer pemerintah. Pertanyaannya adalah, apakah sistem yang sekarang ada di Indonesia berhasil mencapai tujuannya tersebut?

Pada kasus Indonesia, transparansi dan integritas program alokasi dana antarpemerintah sangat mungkin terdistorsi oleh adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme maupun insentif politik yang sifatnya merugikan masyarakat umum. Menurut Brodjonegoro dan Martinez-Vazquez (2004), pada tahun 2001 dan 2002, distribusi Dana Alokasi Umum (DAU) hanya sebagian kecil yang ditentukan oleh formula yang sudah ditetapkan. Pada kenyataannya, pada tahun 2001, hanya 20% dari seluruh dana DAU yang dialokasikan menggunakan formula. Pada tahun 2002, terjadi peningkatan namun tetap hanya mencapai 40% dari DAU yang dialokasikan menggunakan formula tersebut.

Selanjutnya, Kuncoro *et al.* (2013) juga menemukan bahwa implementasi demokrasi pada tingkat daerah juga mengalami hambatan akibat sistem pendanaan partai politik yang menimbulkan insentif yang buruk. Sebagian besar dari dana operasional partai politik di Indonesia datang dari pejabat pemerintah yang korup. Di tingkat legislatif, masih banyak terdapat orang-orang yang menggunakan uang mereka untuk memengaruhi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam membuat kebijakan terkait alokasi dana, penetapan undang-undang, dan kewenangan pemerintah lainnya. Secara praktik, demokrasi di tingkat lokal melalui desentralisasi fiskal belum tentu dapat

mengurangi korupsi jenis tersebut. Meskipun kepala daerah sekarang dipilih melalui pemilihan langsung, setiap kepala daerah tetap berada di bawah kendali kehendak pihak legislatif, karena secara hukum, kepala daerah dapat diganti olehnya. Selain itu, agar program-program daerahnya dapat dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, kepala daerah membutuhkan persetujuan pihak legislatif.

Selain itu, Kuncoro *et al.* (2013) juga menyebutkan besarnya biaya yang dibutuhkan bagi seorang kandidat politik untuk mendapat jabatan politik. Terlebih lagi, uang tersebut tidak datang dari negara maupun partai politik yang diikutinya. Untuk dapat menjadi seorang kandidat dalam sebuah pemilihan umum, seorang individu harus didukung oleh sebuah partai politik atau koalisi partai politik. Apabila seorang kandidat merupakan pemegang jabatan, maka ia dapat menggunakan anggaran daerah yang ia pimpin (baik secara sah maupun tidak), untuk kampanye politiknya.

Meninjau pengalaman pada tingkat internasional, banyak studi yang telah menemukan determinan politik dibalik alokasi dana antarpemerintah. Inman (1988) menemukan bahwa alokasi dana antarpemerintah di Amerika Serikat tidak didasarkan pada kepentingan normatif. Dalam studi lain, Grossman (1994) menemukan bahwa dana alokasi di Amerika Serikat lebih banyak didapatkan oleh negara bagian yang dikuasai oleh partai yang sedang menguasai Kongres Amerika Serikat. Di Eropa, Johansson (1999) menemukan bukti bahwa daerah-daerah subnasional di Swedia mendapatkan dana alokasi yang lebih banyak untuk setiap peningkatan suara potensial yang dapat ia berikan ke partai yang menguasai pemerintah tingkat pusat. Dari temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan faktor politik dalam menentukan transfer antarpemerintah merupakan hal umum yang terjadi di berbagai negara namun dengan faktor yang

berbeda-beda.

Secara konsisten ditemukannya faktor politik sebagai penentu yang penting dalam alokasi dana antarpemerintah daerah harus ditanggapi dengan perhatian khusus oleh kalangan ekonom, ahli keuangan publik, dan penentu kebijakan. Hal ini berarti terdapat kekurangan dalam mekanisme penentuan dana alokasi yang harus diperbaiki.

Berdasarkan pengamatan di atas dan fakta bahwa dalam periode studi yaitu tahun 2004–2008, Indonesia terus menempati posisi bawah dalam *Corruption Perception Index* yang diterbitkan oleh *Transparency International*¹, penulis terdorong untuk melakukan analisis akan keberadaan faktor politik dalam penentuan dana lokasi antarpemerintah Indonesia. Pada tahap awal akan digunakan analisis terhadap DAU sebagai indikasi pertama karena DAU merupakan jenis alokasi yang paling penting di Indonesia (Brodjonegoro dan Martinez-Vazquez, 2004). Selanjutnya dilakukan analisis terhadap Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang menggunakan formula alokasi yang sifatnya tidak seketat formula yang digunakan untuk menentukan DAU, sehingga lebih memungkinkan terjadinya campur tangan politik dalam penentuan besarnya.

Tinjauan Referensi

Menurut Francis (2012), pada dasarnya semua negara telah menempatkan pengaman dalam bentuk formula atau batasan dasar untuk mencegah campur tangan politik dalam alokasi dananya. Namun begitu, pihak-pihak yang berkepentingan sering kali memanfaatkan kelemahan dalam sistem yang berlaku, sehingga penentu dari besarnya alokasi dana tidak selalu sesuai dengan apa yang tertera dalam formula

sehingga berakibat pada banyaknya faktor institusi yang ikut berperan.

Pada umumnya, Bahl (1999) membagi sistem alokasi dana oleh pemerintah di dunia menjadi dua metode. Metode yang pertama bersifat *ad hoc* di mana penentuan alokasi dana dilakukan setiap tahun atau alokasi pemerintah daerah yang dilakukan dengan negosiasi sebagai bagian dari formulasi anggaran pemerintah pusat, sehingga membuka banyak kesempatan bagi politisi untuk melakukan manipulasi demi keuntungan pribadi. Sebaliknya, metode kedua menggunakan formula yang sudah ditetapkan setiap tahunnya.

Boex dan Martinez-Vazquez (2005) mengingatkan bahwa metode kedua yang menggunakan formula juga tidak menjamin alokasi yang bersifat objektif, karena di banyak negara, pemerintah pusat memiliki hak untuk mengubah faktor yang membentuk formula alokasi secara sepihak dan merubah bobot yang menentukan besaran alokasi tersebut pada setiap periode. Selain itu, metode lain yang dapat digunakan pemerintah pusat dalam memengaruhi hasil dari formula yang ada adalah memanipulasi data yang digunakan untuk menentukan formula.

Dalam menentukan faktor penentu alokasi dana pemerintah, literatur ekonomi dapat dibagi menjadi tiga kelompok teori yang utama. Teori yang pertama didasarkan pada teori keuangan negara yang memberikan gambaran normatif akan bagaimana alokasi dana seharusnya dilakukan agar tercapainya pembagian yang efektif dan adil. Dalam memenuhi tujuan efisiensi, sistem alokasi dana antarpemerintah akan berusaha untuk menghapuskan eksternalitas yang muncul terhadap penyediaan barang publik yang terjadi antaryurisdiksi pemerintah.

Teori yang kedua adalah model *voter-choice* yang memberikan pemahaman akan bagaimana mekanisme pemilihan umum dapat memengaruhi keputusan fiskal dari pemerintah pusat. Penemuan dalam topik ini pada umumnya terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama di-

¹Peringkat Indonesia pada *Corruption Perception Index* secara berturut-turut dari tahun 2004 sampai 2008 adalah: 133 dari 145, 137 dari 158, 130 dari 163, 143 dari 179, dan 128 dari 180.

rintis oleh Lindbeck dan Weibull (1987) dan disempurnakan oleh Dixit dan Londregan (1998) disebut hipotesis *swing voters*, di mana pemerintah tingkat pusat ditunjukkan memiliki insentif untuk mengalokasikan lebih banyak dana terhadap provinsi atau negara bagian yang memiliki banyak penduduk yang tidak secara spesifik terikat dengan partai tertentu.

Sebaliknya kubu kedua yang dirintis oleh Cox dan McCubbins (1986) mengemukakan hipotesis *core supporters*, di mana pemerintah pusat dipercaya bersifat *risk averse*, sehingga dana alokasi akan lebih difokuskan kepada negara bagian atau provinsi di mana penduduknya secara jelas terikat dengan partai yang berkuasa di tingkat pusat. Selain model *swing voter* dan *core supporter*, model *voter choice* lain yang cukup umum ditemukan adalah hipotesis *median voter*. Dalam hipotesis ini, dijelaskan bahwa politisi yang dipilih melalui sebuah sistem demokrasi pada umumnya akan mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan preferensi *median voter* dalam konstituennya.

Teori terakhir yang banyak digunakan untuk menjelaskan determinan alokasi dana antarpemerintah menggunakan argumen-argumen ekonomi politik. Studi-studi seperti yang dilakukan oleh Raimondo (1983), Grossman (1994), dan Atlas *et al.* (1995), mencoba untuk memasukkan aspek ekonomi politik dalam kebijakan fiskal pemerintah di luar faktor elektoral yang menjadi fokus dalam model *voter choice*. Teori ekonomi politik di sini memberikan hipotesis bahwa kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh baik karena sumber daya ekonomi maupun jabatan politik memiliki kemampuan untuk "menangkap" proses pengambilan kebijakan terkait alokasi dana antarpemerintah sehingga, distribusi yang dihasilkan alokasi tersebut paling tidak akan ditentukan sebagian oleh faktor politik dan/atau institusi. Menurut Borck dan Owings (2001), dasar dari model ini adalah, bahwa tujuan utama dari pejabat pemerintah bukanlah untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial, namun mengejar

kepentingan pribadi. Hasilnya, model yang menitikberatkan kepada faktor politik lebih menekankan kegagalan politik dibandingkan kegagalan pasar dalam menjelaskan faktor dibalik alokasi dana antarpemerintah.

Salah satu studi utama dalam bidang ekonomi politik ditulis oleh Grossman (1994). Grossman berargumen bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah tingkat pusat untuk membiayai kegiatan atau proyek daerah ikut melibatkan peningkatan pajak dan/atau pengurangan dari pengeluaran yang dapat dikeluarkan atas nama pemerintah pusat. Keputusan-keputusan tersebut membebani pemerintah pusat secara langsung dan ditanggung dengan berkurangnya modal politik pemerintah pusat yang hasilnya dapat dilihat dari berkurangnya suara yang bisa didapatnya tanpa didapatkan keuntungan langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah tingkat pusat sendiri. Apabila keputusan alokasi dana berada di tangan politisi yang ingin memaksimalkan suara yang bisa didapatnya, harus dilihat apa keuntungan yang didapat dari pemerintah pusat karena menurut Dasgupta *et al.* (2004), alokasi hanya memberikan keuntungan politik dalam jumlah kecil kepada pemerintah tingkat pusat.

Dalam membandingkan bukti empiris dari berbagai negara terkait faktor yang menentukan alokasi dana antardaerah, maka diambil contoh-contoh negara yang dapat merepresentasikan keanekaragaman geografi, ekonomi, institusi, dan politik karena pada dasarnya tidak dimungkinkan untuk memperlihatkan perbandingan dari seluruh populasi yang ada². Negara-negara yang dibandingkan adalah Amerika Serikat, Australia, Brazil, Indonesia, Israel, Jepang, Rusia, Spanyol, Tanzania, dan Senegal.

Dalam Tabel 1 (lampiran), semua negara yang digunakan untuk perbandingan menggunakan variabel terikat dalam bentuk dana alo-

²Ketika terdapat lebih dari 1 studi empiris untuk 1 negara yang dipilih, diambil studi yang sifatnya paling menyeluruh dan sesuai dengan Tabel 1 (lampiran).

kasi per kapita. Untuk variabel bebas, meskipun didapatkan beberapa persamaan, namun pada umumnya masing-masing negara menggunakan sebuah variabel yang telah disesuaikan khusus untuk negaranya, khususnya terkait dengan kebutuhan pengeluaran, kapasitas fiskal, dan institusi politik. Sel yang kosong dalam Tabel 1 menandakan bahwa variabel yang terkait dengan kolom tersebut tidak dimasukkan dalam analisis empiris studi tersebut. Hal ini dapat dikarenakan studi tersebut lebih fokus pada aspek fiskal daripada alokasi dana antardaerah. Di sisi lain, banyak juga studi yang lebih menitikberatkan pada faktor politik dalam studi empirisnya sehingga tidak mengikutsertakan peran kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Setiap variabel di Tabel 1 ditandakan dengan positif (+) dan negatif (-) untuk menandakan arah hubungan variabel terikat dengan variabel bebas. Untuk variabel yang ditandakan dengan *TS*, menandakan bahwa variabel itu tidak memiliki dampak yang signifikan pada taraf 10% terhadap alokasi per kapita. Kolom terakhir, R^2 , menunjukkan kemampuan model yang digunakan dalam studi negara tersebut dalam menjelaskan variasi alokasi dana per kapita di negara tersebut.

Perbandingan internasional yang dilakukan secara konklusif dan konsisten menunjukkan bahwa faktor politik memegang peranan yang penting dalam menentukan besaran alokasi dana yang diterima oleh daerah subnasional di sebuah negara. Variasi variabel yang digunakan di setiap negara menunjukkan apakah pemerintah pusat dari negara tersebut mengincar daerah-daerah di mana dukungan politik untuk pemerintah pusat kuat, seperti di Amerika Serikat, Australia, Brazil, Israel, dan Senegal, atau justru mengincar daerah-daerah di mana penduduknya mendukung partai oposisi seperti yang terjadi di Rusia dan Spanyol.

Faktor lain yang menarik untuk diperhatikan adalah populasi yang juga menjadi sebuah faktor yang konsisten menentukan ukuran alokasi

dan yang diterima sebuah daerah. Untuk semua daerah yang menggunakan populasi sebagai sebuah variabel, ditemukan bahwa populasi memiliki dampak yang signifikan terhadap dana alokasi yang diterima daerah tersebut. Dari delapan negara yang menggunakan populasi sebagai variabel bebas, hanya di Amerika Serikat yang ditemukan hubungan yang positif dengan alokasi dana yang diterima oleh daerah tersebut.

Hubungan yang negatif umumnya terjadi karena formula yang digunakan oleh pemerintah pusat menggunakan sebuah komponen "bagi rata" atau jumlah tetap, sehingga masing-masing daerah mendapatkan sejumlah uang dasar yang sama tanpa memperhitungkan faktor-faktor lainnya, termasuk populasi. Faktor kedua yang dapat menjelaskan hubungan negatif dari populasi terhadap variabel terikat adalah persepsi para pengambil kebijakan akan keberadaan *economies of scale* dalam penyediaan barang publik sehingga menimbulkan insentif untuk memasukkan komponen jumlah tetap dalam formulasi alokasi. Alasan ketiga yang dapat menjelaskan bias terhadap daerah dengan populasi yang lebih kecil adalah motivasi politik, yaitu keinginan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan politik dari pemerintah tingkat subnasional (Gubernur, Bupati, dan Walikota) atau DPR daerah tersebut pada tingkat nasional.

Dalam studi ini, jenis alokasi dana yang akan dibahas adalah DAU, dan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. DAU adalah tipe alokasi yang paling penting di Indonesia (Brodjonegoro dan Martinez-Vazquez, 2004) dan dapat diklasifikasikan sebagai alokasi yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dalam penggunaannya.

Dalam formulasinya, DAU didasarkan pada Alokasi Dasar dan Celah Fiskal suatu daerah. Celah Fiskal adalah selisih antara Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal, di mana dalam menghitung kebutuhan fiskal digunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks

Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. Sebaliknya, Kapasitas Fiskal dihitung berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil. Formula perhitungan DAU untuk tingkat provinsi dan kota/kabupaten didasarkan pada faktor yang sama namun memiliki pembobotan yang berbeda.

Jenis alokasi dana berikutnya yang dibahas dalam studi ini, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, muncul akibat terjadinya penyerahan urusan kepada pemerintah kepala daerah, sehingga Kementerian/Lembaga Negara tidak lagi membutuhkan instansi vertikal di daerah tingkat subnasional di Indonesia.

Definisi Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang/urusan pemerintahan dari Pemerintah kepada gubernur yang merupakan wakil pemerintah pada tingkat daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Di sisi lain, Tugas Pembantuan merupakan penugasan Pemerintah terhadap daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi pada kabupaten, kota dan/atau desa, serta dari pemerintah tingkat kabupaten, atau kota terhadap desa demi melaksanakan suatu tugas dengan kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya kepada yang memberikan tugas.

Mekanisme pengalokasian Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tersebut adalah melalui pelimpahan tugas dan wewenang dari kementerian kepada para kepala daerah yang telah dipilih menggunakan sebuah sistem perencanaan dan penganggaran yang telah tertera pada APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyelenggaraannya, terdapat beberapa instansi pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah yang ikut terlibat. Secara spesifik, sumber Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sendiri berasal dari APBN dan merupakan bagian dari anggaran kementerian/lembaga, sehingga pengesahannya sendiri tidak terlepas dari persetujuan DPR.

Pada dasarnya, diwajibkan bahwa setiap kegiatan dan program yang akan didanai oleh kementerian negara/lembaga dengan menggunakan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tidak bertumpuk dengan program maupun kegiatan daerah tersebut yang harus didanai oleh APBD, sebab sewajarnya terdapat perbedaan antara urusan yang didanai keduanya. Walaupun secara sah Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan terpisah dari APBD, namun dana tersebut dapat dijadikan penunjang dari APBD daerah yang menerimanya. Alasannya, segala aset yang menjadi hasil dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan akan pindah kepemilikannya kepada daerah tersebut supaya dapat dipergunakan dan dioperasikan demi kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Perbedaan utama antara kegiatan yang dibiayai oleh Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah, Dana Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap, sedangkan Dana Tugas Pembantuan digunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik. Dana Dekonsentrasi digunakan antara lain untuk sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, studi dan survei, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian. Sebaliknya, Dana Tugas Pembantuan digunakan antara lain untuk pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, serta kegiatan fisik lain yang menambahkan aset pemerintah.

Formulasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilakukan dengan pertimbangan agar alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tidak terkonsentrasi, bersifat transparan dan akuntabel, sehingga pemerintah mengharapkan adanya proporsionalitas dengan memperhatikan aspek keseimbangan pendanaan yang bersumber dari dua variabel umum, yaitu Variabel Kemampuan Fiskal Daerah dan Variabel Pembangunan di daerah. Ke-

mampuan Fiskal Daerah menggambarkan kemampuan keuangan daerah, sedangkan variabel Pembangunan dihitung dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia, jumlah penduduk, dan Indeks Kemahalan Konstruksi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Penetapan besaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang akan diterima oleh tiap-tiap daerah dimulai dari bulan Februari di mana Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional melakukan perkiraan kapasitas fiskal sekaligus menyusun pembiayaan rencana kerja bersama masing-masing kementerian dan lembaga negara lainnya. Pada bulan Juli, pagu anggaran dari setiap kementerian dan lembaga ditentukan, dan berdasarkan itu disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing.

Selanjutnya, RKA awal yang disusun dibawa ke DPR untuk dibahas sebagai bagian dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), sebelum selanjutnya disatukan. Pada bulan Agustus sampai Oktober, RAPBN yang telah disatukan dibahas dalam sidang kabinet, di mana para anggota DPR dari komisi yang terkait memberi masukan dan mengesahkan rencana-rencana yang diformulasikan tiap-tiap kementerian dan lembaga, termasuk yang menggunakan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sebelum akhirnya, hasil dari rapat kabinet ditetapkan dalam alokasi anggaran pada bulan November. Karena ditentukan dalam waktu bersamaan dan memiliki sifat komplementer antara satu dengan yang lainnya, besarnya Dana Dekonsentrasi ditentukan oleh besarnya Dana Tugas Pembantuan dan begitupun sebaliknya.

Metode

Pendekatan teori dalam studi ini menggunakan pendekatan Grossman (1994). Dalam pendekatan teori ini, pejabat dan politisi di tingkat pusat diasumsikan mengambil tindakan untuk memaksimalkan suara yang akan didapatkan

nya. Para politisi dan pejabat tersebut menggunakan kendali mereka akan anggaran yang mereka miliki – baik dalam bentuk barang publik yang disediakan langsung pemerintah pusat maupun alokasi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memengaruhi pilihan masyarakat dalam pemilu. Sebaliknya, dalam mengambil keputusan untuk memilih dalam pemilu, masyarakat diasumsikan untuk memiliki tanggapan positif terhadap tiga hal, yaitu: (1) peningkatan pengeluaran akan barang publik oleh pemerintah pusat; (2) peningkatan pengeluaran daerah (atau pengurangan pajak daerah) yang dirasa oleh masyarakat diakibatkan oleh dana alokasi pemerintah pusat; dan (3) pengeluaran kapital politik yang didapatkan dari politisi daerah dan kelompok kepentingan pada tingkat daerah untuk memengaruhi hasil pemilu.

Politisi pada tingkat pusat menggunakan dana alokasi untuk membeli kapital politik, yaitu pengaruh yang dimiliki oleh politisi daerah dan kelompok kepentingan yang memiliki popularitas tinggi di daerahnya, untuk memengaruhi keputusan masyarakat di masing-masing daerah.

Namun begitu, politisi dibatasi dalam mencapai tujuannya oleh sebuah kondisi anggaran berimbang. Dengan asumsi *ceteris paribus*, alokasi dana akan lebih banyak didapatkan oleh daerah-daerah yang memiliki kapital politik paling banyak dan paling berharga³.

Apabila distribusi dari alokasi dana dirancang untuk mendukung tujuan politik dari para pemberi dana, maka variabel politik yang digunakan dalam studi diharapkan dapat menggambarkan seberapa efektif kapital politik yang dimiliki politisi dan kelompok kepentingan di tingkat daerah. Atas dasar tersebut, politisi a-

³Apabila terdapat kasus di mana masyarakat dapat langsung mengetahui bahwa pengeluaran pemerintah daerah dibiayai langsung melalui pengeluaran pemerintah pusat, maka politisi tingkat pusat dapat secara langsung mendapatkan keuntungan melalui meningkatnya jumlah suara ekspektasi yang ia dapatkan.

kan berusaha untuk mengalokasikan dana untuk mencapai keuntungan politik dalam bentuk ekspektasi suara sebesar-besarnya.

Empat variabel politik yang digunakan dalam studi adalah sebagai berikut. Variabel pertama, *oposisi*, adalah partai Gubernur setiap provinsi yang digunakan untuk melihat afiliasinya dengan partai penguasa bagian eksekutif di pemerintahan pusat. Variabel ini digunakan untuk menguji model Cox dan McCubins (1986), di mana strategi yang paling efektif bagi kandidat politik adalah untuk memberikan alokasi yang lebih banyak ke pendukungnya. Variabel kedua, *marginlegislatif*, digunakan untuk mengukur hipotesis *swing voters*, sebagaimana digunakan dalam studi Veiga dan Pinho (2007), di mana pemerintah pusat meningkatkan dana alokasi untuk daerah-daerah yang selisih suaranya kecil agar lebih meningkatkan kemungkinan menang.

Selanjutnya, variabel ketiga, *leadershare*, merupakan proporsi kursi DPR yang dipegang oleh partai mayoritas di DPR, yaitu Partai Golkar dalam studi ini, untuk setiap provinsi. Sedangkan variabel keempat, *demokratshare*, merupakan proporsi kursi DPR yang dipegang oleh Partai Demokrat untuk setiap provinsi. Dibutuhkan dua variabel untuk menjelaskan afiliasi daerah dengan bidang legislatif karena kondisi unik di Indonesia di mana partai Presiden sebagai pemimpin lembaga eksekutif, yang menjabat pada tahun 2004–2008, tidak sama dengan partai mayoritas di lembaga legislatif pada tahun 2004–2008. Variabel sejenis digunakan oleh Grossman (1994) dalam studi empirisnya untuk mengukur dampak Presiden dalam penentuan alokasi dana. Dalam studinya yang menggunakan data pada saat Ronald Reagan menjadi pemimpin Amerika Serikat, keadaan Amerika Serikat sama dengan Indonesia pada periode 2004–2008, di mana partai Presiden (Republik) berbeda dengan partai yang menguasai Kongres Amerika Serikat saat itu (Demokrat).

Keempat variabel di atas akan dimasukkan

dalam variabel empiris untuk mengukur arah dan ukuran dari pengaruh politik terhadap alokasi dana pemerintah pusat Indonesia kepada pemerintah provinsi melalui instrumen Dana Alokasi Khusus, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Mengingat banyaknya jumlah partai yang terdapat di Indonesia, sebuah keadaan yang membuatnya berbeda dengan negara Amerika Serikat yang hanya memiliki dua partai, studi ini menggunakan Indeks *Herfindahl-Hirschman* (HHI) Pemerintahan sebagaimana diterapkan oleh Gregorini dan Longoni (2009). Dengan memasukkan indeks ini ke dalam model, jumlah dan persaingan berbagai partai di tiap provinsi akan diperhitungkan dampaknya, sehingga hasil regresi juga dapat digunakan untuk menganalisa dampak fragmentasi pemerintahan daerah terhadap alokasi dana yang didapatkan. Indeks ini dihitung untuk masing-masing provinsi dengan mengkuadratkan proporsi kursi masing-masing partai dari total perwakilan provinsi tersebut di DPR dan menjumlahkannya. Untuk provinsi yang hanya diwakili oleh 1 partai, HHI mereka adalah 1, sedangkan koalisi akan digambarkan oleh HHI di antara 0–1. Semakin banyak jumlah partai dalam koalisi, akan semakin rendah HHI provinsi tersebut. Menurut Gregorini dan Longoni, HHI yang semakin mendekati satu berarti suatu daerah kemungkinan besar dikuasai oleh partai yang memegang mayoritas suara di parlemen (Golkar dalam kasus Indonesia), sehingga diprediksi akan memiliki hubungan positif signifikan dengan transfer yang diterima sebuah daerah.

Dalam melakukan analisis empiris terhadap alokasi DAU, variabel-variabel bebas berasal dari komponen indeks Williamson yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menentukan besaran DAU yang diterima masing-masing provinsi. Meskipun pembobotan masing-masing variabel yang digunakan untuk mengukur kapasitas dan kebutuhan fiskal berubah setiap tahunnya untuk mendapat-

kan sebuah nilai dari indeks Williamson, variabel yang digunakan pada dasarnya tetap sama. Atas dasar tersebut, model berikut digunakan untuk mengukur alokasi DAU per kapita:

Model Dana Alokasi Umum

$$\begin{aligned} daukap_{it} = & \alpha + \beta_1 populasi_{it} + \beta_2 luaswilayah_{it} \\ & + \beta_3 ikk2010_i + \beta_4 hdi_{it} \\ & + \beta_5 pdrbkap_{it} + \beta_6 padpendtotal_{it} \\ & + \beta_7 pajakbukanpajak_{it} \\ & + \beta_8 bpkap_{it} + \beta_9 marginlegislatif_i \\ & + \beta_{10} oposisi_i + \beta_{11} demokratshare_i \\ & + \beta_{12} leadershare_i + \beta_{13} hhi_i + u \end{aligned} \quad (1)$$

dengan:

daukap = DAU per kapita;

populasi = jumlah penduduk;

luaswilayah = luas provinsi (km²);

ikk2010 = Indeks Kemahalan Konstruksi 2010;

hdi = Indeks Pembangunan Manusia;

pdrbkap = PDRB per Kapita Riil;

padpendtotal = rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Total;

pajakbukanpajak = jumlah Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya;

bpkp = pengeluaran untuk belanja pegawai per kapita;

marginlegislatif = selisih perolehan suara partai di lembaga eksekutif dan partai mayoritas/mayoritas kedua;

oposisi = partai gubernur;

leadershare = proporsi kursi DPR partai mayoritas di DPR (Golkar);

demokratshare = proporsi kursi DPR Partai Demokrat; dan

HHI = Indeks *Herfindahl-Hirschman*.

Selanjutnya, dibentuk juga model untuk mengukur Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Komponen Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diambil dari *Pelengkap Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah 2012* yang diterbitkan

oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan begitu, didapatkan model empiris sebagai berikut untuk mengukur alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan per kapita:

Model Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

$$\begin{aligned} dekonkap_{it}/tpkap_{it} = & \alpha + \beta_1 dekonkap_{it}/tpkap_{it} \\ & + \beta_2 populasi_{it} \\ & + \beta_3 pdrbkap_{it} \\ & + \beta_4 apbdpukap_{it} \\ & + \beta_5 ikk2010_i \\ & + \beta_6 marginlegislatif_i \\ & + \beta_7 oposisi_i \\ & + \beta_8 demokratshare_i \\ & + \beta_9 leadershare_i \\ & + \beta_{10} hhi_i + u_{it} \end{aligned} \quad (2)$$

dengan:

dekonkap = Dana Dekonsentrasi per kapita;

tpkap = Dana Tugas Pembantuan per kapita; dan

apbdpukap = anggaran pendapatan dan belanja daerah yang digunakan pekerjaan umum per kapita.

Hasil dan Analisis

Melalui pengujian *Breusch Pagan Lagrange Multiplier*, ditemukan bahwa metode yang cocok digunakan dalam pengujian model DAU adalah *random effect*. Tabel 2 (lampiran) memberikan ringkasan *output* untuk hasil pengujian model menggunakan program *stata*. Pengujian *Best, Linear, Unbiased, Estimator* (BLUE) tidak lagi dilakukan karena menggunakan *random effect*.

Model pertama yang digunakan tidak menggunakan variabel politik. Dilihat dari probabilitas $chi^2 < \alpha$ (1%), yang artinya secara bersama, variabel bebas yang digunakan dalam model memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

variabel terikat (*daukap*) dengan tingkat keyakinan 99%. Meninjau *overall R²* yang bernilai 0,4980, berarti model yang digunakan dapat menjelaskan 49,8% dari variasi variabel terikat.

Sebagaimana terlihat pada beberapa negara pada bagian tinjauan referensi, Indonesia juga menjadi salah satu negara di mana semakin besar populasi sebuah provinsi, semakin kecil DAU per kapitanya. Hal ini dibuktikan dengan signifikansi variabel populasi dan arah hubungannya yang positif dengan variabel terikat. Hal ini mungkin dapat dijelaskan dengan melihat bahwa DAU lebih banyak diterima oleh provinsi di luar Pulau Jawa yang relatif lebih sedikit penduduknya demi mendukung pemerataan.

Signifikansi variabel *ikk2010*, *hdi*, *pdrbkap*, dan *pajakbukapajak* sesuai dengan hipotesis karena memang keempat hal tersebut merupakan komponen dari alokasi DAU yang menjadi dasar dari indeks Williamson. Namun begitu, terlihat bahwa variabel *hdi* memiliki koefisien arah hubungan yang positif dengan variabel terikat yang berarti daerah dengan tingkat Indeks Pembangunan Manusia yang lebih tinggi justru mendapatkan DAU per kapita yang lebih besar. Sebaliknya, tidak signifikannya variabel *padpendtotal*, *luaswilayah*, dan *bpkap* dapat dijelaskan karena porsi pendapatan asli daerah dan luas wilayah yang relatif kecil dalam indeks Williamson.

Selanjutnya, dilakukan pengujian dengan empat variabel politik sekaligus variabel *hhi* yang menjadi fokus dari studi. Dibandingkan model sebelumnya, terjadi peningkatan *overall R²* yang signifikan dari model sebelumnya dari 0,498 menjadi 0,7197. Artinya, model kedua dapat menjelaskan variasi pada variabel terikat sebesar 71,97%. Peningkatan ini berarti bahwa faktor politik memang memiliki peran yang penting dalam menentukan besarnya DAU per kapita yang diterima masing-masing provinsi di Indonesia.

Masuknya variabel-variabel politik tidak mengubah dampak variabel lain terhadap mo-

del secara signifikan. Perubahan tingkat signifikansi hanya terjadi pada variabel *ikk2010* dan *bpkap*, di mana *ikk2010* menjadi signifikan pada taraf 5% dan *bpkap* menjadi signifikan pada taraf 1%.

Dari 5 variabel baru yang dimasukkan dalam model, 2 variabel ditemukan memiliki dampak signifikan terhadap variabel terikat dalam model yaitu *demokratshare* dan *hhi*. Dari penemuan ini, tidak didapatkan dukungan atas teori Cox dan McCubbin (1986) yang menyebutkan bahwa politisi di lembaga eksekutif mendukung konstituennya. Tidak signifikannya variabel *oposisi* dan *leadershare* berarti provinsi yang dipimpin oleh gubernur yang berasal dari partai atau koalisi partai yang sama dengan Presiden, maupun provinsi yang memiliki proporsi politisi yang lebih besar dari Partai Golkar (sebagai mayoritas di lembaga legislatif pada periode tersebut), tidak mendapatkan alokasi DAU per kapita yang lebih besar. Hasil ini sama dengan yang ditemukan oleh Johansson (1999) untuk kasus di Swedia.

Meskipun variabel *marginlegislatif* tidak memiliki dampak yang signifikan, signifikansi variabel *demokratshare* beserta nilainya yang negatif justru mendukung hipotesis bahwa tidak terdapat pengaruh politik dalam penentuan DAU. Sebagai partai yang menguasai lembaga eksekutif, sangat kecil kemungkinannya bagi Partai Demokrat untuk secara sengaja mengurangi jumlah DAU per kapita yang dialokasikan ke provinsi-provinsi di mana jumlah pendukungnya tinggi.

Berdasarkan model teori Grossman (1994) yang menjadi dasar dari studi ini, salah satu alasan di mana masyarakat dapat memberikan tanggapan positif terhadap perbuatan pemerintah pusat sehingga memengaruhi hasil pemilihannya adalah, apabila terjadi peningkatan pengeluaran daerah (atau pengurangan pajak daerah) yang dirasakan oleh masyarakat diakibatkan oleh dana alokasi pemerintah pusat. Berbeda dengan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang secara jelas merupakan

kegiatan pemerintah pusat, pengeluaran pemerintah daerah yang bersumber dari DAU telah menjadi bagian dari APBD sehingga sulit bagi pemerintah pusat untuk mendapatkan pengakuan atas diperolehnya dana tersebut.

Signifikansi dan arah hubungan variabel *hhi* sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Gregorini dan Longoni (2009) yang menyebutkan bahwa semakin kecil fragmentasi politik sebuah daerah, semakin besar transfer yang akan didapatkannya dari pemerintah pusat. Penemuan ini ikut mendukung hipotesis bahwa Partai Demokrat tidak memiliki campur tangan dalam menentukan alokasi DAU, apalagi melihat signifikansi variabel *hhi* yang lebih besar dibandingkan variabel *demokratshare*.

Selanjutnya, dilakukan analisis akan keberadaan dan besarnya determinan politik dalam menentukan jumlah alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di bawah yang diterima oleh masing-masing provinsi. Karena adanya variabel bebas yang tidak berubah seiring waktu, maka metode regresi yang dapat digunakan adalah *random effect* dan *pooled least square*. Melalui pengujian *Breusch Pagan Lagrange Multiplier*, ditemukan bahwa metode yang cocok digunakan dalam pengujian ketiga model yang terkait Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah *pooled least square*. Karena ditemukannya heteroskedastisitas melalui pengujian *white heteroscedasticity*, digunakan *Feasible Generalized Least Square* untuk mengatasinya.

Pertama, dilakukan analisis terhadap alokasi Dana Dekonsentrasi. Dilihat dari probabilitas $chi^2 < \alpha$ (1%), dapat disimpulkan bahwa, secara bersamaan, variabel bebas yang digunakan dalam model memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (*dekonkap*) dengan tingkat keyakinan 99%.

Namun begitu, hanya satu variabel, yaitu *tpkap* yang memiliki hubungan signifikan dengan variabel terikat. Kemampuan model ini dalam menjelaskan besarnya Dana Dekonsentrasi yang diterima oleh masing-masing provin-

si cukup lemah akibat bentuk penggunaan Dana Dekonsentrasi yang bersifat nonfisik seperti kegiatan sinkronisasi, koordinasi perencanaan, dan survei. Kegiatan-kegiatan demikian dalam bentuk yang tersebar ke banyak kementerian dan lembaga, sulit ditangkap oleh satu model.

Selain itu juga tidak ditemukan dampak yang signifikan antara variabel *marginlegislatif*, *oposisi*, *demokratshare*, dan *leadershare* terhadap Dana Dekonsentrasi per kapita yang diterima oleh masing-masing provinsi. Dengan tidak adanya variabel politik yang signifikan dalam memengaruhi variabel terikat, dapat disimpulkan bahwa alokasi dari Dana Dekonsentrasi bebas dari pengaruh politik, baik dari lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif.

Selanjutnya, pada model berikutnya dilakukan analisis terhadap faktor penentu besarnya Dana Tugas Pembantuan per kapita yang diterima setiap provinsi. Dalam analisis regresinya, model ini menggunakan metode *pooled least square*, yang dipilih setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan *Breusch Pagan Lagrange Multiplier*.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 3 (lampiran), terdapat lima variabel bebas yang memberikan pengaruh signifikan terhadap alokasi Dana Tugas Pembantuan per kapita yang diterima masing-masing provinsi. Berbeda dengan hubungannya dengan alokasi Dana Dekonsentrasi, variabel *populasi* memiliki hubungan yang signifikan dan negatif dengan Dana Tugas Pembantuan. Demikian juga dengan *pdrbkap* masing-masing provinsi. Kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang signifikan dan negatif.

Hal tersebut menunjukkan bahwa alokasi Dana Tugas Pembantuan mengandung unsur normatif dalam bentuk pemerataan yang kuat sebagaimana dihimbau dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dana Tugas Pembantuan yang berupa pembangunan variabel fisik lebih dikonsentrasikan ke provinsi-provinsi yang

memiliki PDRB per kapita rendah. Variabel *apbdpukap*, yang dampaknya signifikan dan positif juga sesuai dengan hipotesis karena pada umumnya daerah yang mengeluarkan dana besar untuk pekerjaan umum akan mengerjakan banyak proyek-proyek fisik yang dibiayai oleh Dana Tugas Pembantuan.

Di antara 4 variabel politik yang digunakan, ditemukan 1 hubungan yang signifikan dan positif, yaitu pada variabel *leadershare*. Dengan demikian model ini mendukung penemuan Grossman (1994) di mana ditemukan hubungan yang positif dan signifikan akan proporsi kursi yang dimiliki partai yang menguasai DPR (Kongres untuk kasus di Amerika Serikat), namun tidak ditemukan hubungan antara partai gubernur (oposisi) yang menjabat di suatu provinsi dengan dana alokasi per kapita yang diterima.

Menurut Grossman, tidak signifikannya partai gubernur diakibatkan oleh batasan masa jabatan yang dihadapi oleh gubernur itu sendiri. Selain itu, lebih besar kemungkinan sebuah partai untuk memiliki kekuasaan jangka panjang sebagai perwakilan legislatif sebuah provinsi dibandingkan sebagai gubernur. Atas alasan tersebut, politisi yang bertujuan memaksimalkan perolehan suaranya akan menyesuaikan alokasi dana yang berada di bawah kendalinya dengan geografi lembaga legislatif yang lebih stabil dibandingkan lembaga eksekutif. Penemuan ini juga didukung dengan variabel *hhi* yang signifikan pada taraf 1%, yang mengindikasikan pengarahannya Dana Tugas Pembantuan ke daerah dengan fragmentasi politik yang kecil (kekuasaan Partai Golkar semakin mendekati mutlak).

Dari penemuan ini juga dapat disimpulkan bahwa Partai Golkar yang merupakan mayoritas di DPR pada periode tersebut memiliki kendali yang lebih besar akan penentuan alokasi Dana Tugas Pembantuan per kapita. Sebaliknya, tidak ditemukan faktor politik dalam penentuan DAU pada periode 2004–2009.

Simpulan

Hasil studi ini menemukan bahwa, ditemukannya hubungan yang negatif dan signifikan terhadap proporsi kursi yang dimiliki Partai Demokrat dengan DAU per kapita yang didapatkan oleh masing-masing provinsi justru memperkuat dukungan akan tidak adanya determinan politik dalam penentuan alokasi DAU. Hal ini didukung oleh model teori Grossman (1994) yang menjadi acuan studi, di mana masyarakat baru akan memberikan tanggapan positif apabila mereka dapat mengetahui asal dari dana (baik dalam bentuk peningkatan pelayanan publik maupun kas langsung) yang mereka terima. Terkait hal ini, sulit bagi masyarakat masing-masing provinsi untuk mengetahui bahwa peningkatan dana yang mereka terima, karena DAU sudah menjadi bagian dari APBD masing-masing provinsi.

Dalam pengalokasian Dana Dekonsentrasi, tidak ditemukan faktor politik yang menjadi determinan dalam penentuan besarnya Dana Dekonsentrasi per kapita yang diterima oleh masing-masing provinsi. Hal ini mungkin muncul akibat kelemahan model dalam menjelaskan alokasi Dana Dekonsentrasi yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan nonfisik dan berada di bawah kendali oleh sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah pusat.

Ditemukan faktor politik yang signifikan memengaruhi alokasi Dana Tugas Pembantuan yaitu proporsi kursi DPR sebuah provinsi yang dikuasai oleh Partai Golkar yang merupakan partai mayoritas pada DPR saat periode yang diteliti. Dengan disertai adanya faktor partai gubernur yang tidak signifikan dampaknya terhadap alokasi Dana Tugas Pembantuan, hal ini dapat dijelaskan oleh terbatasnya periode menjabat seorang gubernur sehingga sebuah partai akan lebih memusatkan kapital politiknya ke daerah-daerah di mana kekuatannya sebagai lembaga legislatif lebih terakarkan.

Daftar Pustaka

- [1] Alperovich, G. (1984). The Economics of Choice in the Allocation of Intergovernmental Grants to Local Authorities. *Public Choice*, 44, 285–296.
- [2] Atlas, C. M., Gilligan, T. W., Hendershott, R. J., & Zupan, M. A. (1995). Slicing the Federal Government Net Spending Pie: Who Wins, Loses and Why. *The American Economic Review*, 85 (3), 624–629.
- [3] Bahl, R. (1999). Implementation Rules for Fiscal Decentralization. *International Studies Program Working Paper*, 99-1. Atlanta, Georgia: International Studies Program. School of Policy Studies. Georgia State University. <http://aysps.gsu.edu/sites/default/files/documents/icepp/wp/ispwp9901.pdf> (Accessed December 15, 2012).
- [4] Boex, J. & Martinez-Vazquez, J. (2005). The Determinants of the Incidence of Intergovernmental Grants: A Survey of the International Experience. *International Studies Program Working Paper*, 05-09. Atlanta, Georgia: International Studies Program. School of Policy Studies. Georgia State University. <http://aysps.gsu.edu/sites/default/files/documents/icepp/wp/ispwp0509.pdf> (Accessed December 15, 2012).
- [5] Borck, R. & Owings, S. (2001). The Political Economy of Intergovernmental Grants. *Regional Science and Urban Economics*, 33 (2), 139–156.
- [6] Brodjonegoro, B. & Martinez-Vazquez, J. (2004). An Analysis of Indonesia's Transfer System: Recent Performance and Future Prospects. In J. Alm, J. Martinez, & S. M. Indrawati (Eds.), *Reforming Intergovernmental Fiscal Relations and The Rebuilding of Indonesia: The "Big Bang" Program and Its Economic Consequences*. pp. 159–198. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- [7] Caldeira, E. (2011). Does the System of Allocation of Intergovernmental Transfers in Senegal Eliminate Politically Motivated Targeting? *Working Papers CERDI, Etudes et Documents*, E 2011.05. France: CERDI. <http://publi.cerdi.org/ed/2011/2011.05.pdf> (Accessed December 15, 2012).
- [8] Cox, G. W. & McCubbins, M. (1986). Electoral Politics as a Redistributive Game. *Journal of Politics*, 48 (2), 370–389
- [9] Dasgupta, S., Dhillon, A., & Dutta, B. (2004). Electoral Goals and Center-State Transfers: A Theoretical Model and Empirical Evidence from India. *Unpublished Manuscript*. Coventry, United Kingdom: Department of Economics. University of Warwick. <http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/academic/dhillon/wp/grantsmail4.pdf> (Accessed December 15, 2012).
- [10] Dixit, A. & Londregan, J. (1998). Ideology, Tactics, and Efficiency in Redistributive Politics. *The Quarterly Journal of Economics*, 113 (2), 497–529.
- [11] Francis, S. (2012). Fiscal Policy Evolution and Distributional Implications: The Indonesian Experience. *The IDEAS Working Paper Series*, 01/2012. http://www.networkideas.org/working/may2012/01_2012.pdf (Accessed December 15, 2012).
- [12] Gregorini, F. & Longoni, E. (2009). Inequality, Political Systems and Public Spending. *Working Papers*, 159. Milano, Italy: University of Milano-Bicocca, Department of Economics. <http://dipeco.economia.unimib.it/repec/pdf/mibwpaper159.pdf> (Accessed December 15, 2012).
- [13] Grossman, P. J. (1994). A Political Theory of Intergovernmental Grants. *Public Choice*, 78 (3/4), 295–303.
- [14] Inman, R. P. (1988). Federal Assistance and Local Services in the United States: the Evolution of a New Federalist Fiscal Order. In H. Rosen (Ed.), *Fiscal Federalism*. pp. 33–77. Chicago: University of Chicago Press.
- [15] Johansson, E. (1999). Intergovernmental Grants as a Tactical Instrument: Empirical Evidence from Swedish Municipalities. *Journal of Public Economics*, 87 (5–6), 883–915.
- [16] Kraemer, M. (1997). Intergovernmental Transfers and Political Representation: Empirical Evidence from Argentina, Brazil and Mexico. *Inter-American Development Bank Working Paper*, 345.
- [17] Kuncoro, A., Adrison, V., & Isfandiarni, I. (2013). Varieties of Governance of Public Goods Delivery in Indonesia: The Case of Roads After Decentralization and Local Democratization. *Working Papers in Economics and Business, Volume III No. 1/2013*. Depok: Faculty of Economics, University of Indonesia. <http://econ.fe.ui.ac.id/uploads/201301.pdf> (Accessed March, 20, 2013).
- [18] Lindbeck, A. & Weibull, J. W. (1987). Balanced-Budget Redistribution as The Outcome of Political Competition. *Public Choice*, 52 (3), 273–297.
- [19] Mayer, S. A. & Naka, S. (2001). The Determinants of Japanese Local-Benefit Seeking. *Contemporary Economic Policy*, 17 (1), 87–96.
- [20] Raimondo, H. J. (1983). The Political Economy of State Intergovernmental Grants. *Growth and Change*, 14 (2), 17–23.
- [21] Sole-Olle, A. & Sorribas-Navarro, P. (2010). The Effects of Partisan Alignment on the Allocation of Intergovernmental Transfers: Differences-in-differences Estimates for Spain. *IFIR Working Paper*, 2006-09. United States: University of Kentucky, Institute for Federalism and Intergover-

mental Relations.

- [22] Treisman, D. (1996). The Politics of Intergovernmental Transfers in Post Soviet Russia. *British Journal of Political Science*, 26 (3), 299–335.
- [23] Veiga, L. G. & Pinho, M. (2007). The Political Economy of Intergovernmental Grants: Evidence from a Maturing Democracy. *Public Choice*, 133 (3), 457–477.
- [24] Worthington, A. C. & Dollery, B. E. (1998). The Political Determination of Intergovernmental Grants in Australia. *Public Choice*, 94 (3–4), 299–315.

Tabel 1: Perbandingan Internasional Faktor Penentu Dana Alokasi Antardaerah (Amerika Serikat (Borck dan Owings, 2001); Australia (Worthington dan Dollery, 1998); Brazil (Kraemer 1997); Indonesia (Brodjonegoro dan Martinez-Vazquez, 2004); Israel (Alperovich, 1984); Jepang (Mayer dan Naka, 1999); Rusia (Treisman 1996); Spanyol (Sole-Olle dan Sorribas-Navarro, 2006); Tanzania (Boex, 2003); Senegal (Caldeira, 2011))

Negara	Kebutuhan Pengeluaran	Kapasitas Fiskal	Kekuatan Politik	Ukuran Populasi	R^2
Amerika Serikat	Kriminalitas: + Sekolah: +	Pendapatan: - Pengeluaran: +	Partai Gubernur: +	Populasi: +	0,78
Australia	Rasio Kebutuhan Pengeluaran: +	-	Rep. Legislatif: + Dukungan: + Suara: +	-	0,77
Brazil	-	Pendapatan: - PDRB: +	-	Populasi: -	0,35 0,23
Indonesia	Kemiskinan: + Harga Regional: +	-	-	-	-
Israel	Ketertantuan Populasi: +	Defisit: +	Dukungan Politik: +	Populasi: -	0,64
Jepang	Lokasi: TS	Pendapatan: +	Rep. Politik: +	Populasi: -	0,97
Rusia	Indeks Barang Publik: +	Keuntungan: -	Status Khusus: + Dukungan Politik: -	Populasi: -	0,62
Spanyol	-	Bunga / Pendapatan: TS	Selisih Suara: + Partai Kepala Daerah: TS	Luas / Populasi: -	0,43
Tanzania	Kemiskinan : + Umur Sekolah : +	Pengeluaran RT : +	Kota: +	Populasi: -	0,52
Senegal	-	Keterbatasan Pendapatan: -	Afiliasi Legislatif: + Selisih Suara: - Etnis: +	Populasi: -	0,43

Sumber: dari Berbagai Sumber, diolah

Tabel 2: Ringkasan *Output* Model DAU Per Kapita

Variabel Bebas	Variabel Terikat	
	daukap (1)	daukap (2)
populasi	-0,0023*	-0,001488*
luaswilayah	-0,00017	0,0001135
ikk2010	3,748***	2,312819**
hdi	21,1018***	15,8696***
pdrbkap	-0,0000104***	-7.35e-06***
padpendtotal	-1.049.428	-1.494.427
pajakbukanpajak	-4.28e-06*	-4.66e-06*
bpkap	-0,1958**	-0,247929***
marginlegislatif	-	-0,0559337
oposisi	-	7.777.266
demokratshare	-	-540,1935**
golkarshare	-	625.612
Hhi	-	441,6107***
_cons	-1601.841***	-1.208.608
Metode	<i>Random Effect</i>	<i>Random Effect</i>
R-Squared (Overall)	0,4980	0,7197
Prob (chi2)	0,00	0,00
BP-LM Test (chi2)	0,00	0,00
Total Panel Obs.	135	135

Keterangan: * signifikan pada taraf 10%
 ** signifikan pada taraf 5%
 *** signifikan pada taraf 1%

Tabel 3: Ringkasan *Output* Model Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Per Kapita

Variabel Bebas	Variabel Terikat	
	dekonkap	Tpkap
tpkap / dekonkap	1.746174***	0,2606898***
populasi	-0,000333	-0,000657*
pdrbkap	-2.60e-07	-1.07e-06*
apbdpukap	-0,7741	0,100524**
ikk2010	-0,2535814	0,3069296*
marginlegislatif	0,0002875	-0,1433219
oposisi	1.106.167	-1.038.826
demokratshare	8.053.216	-3.095.682
golkarshare	-2.012.505	99.30991*
hhi	3.780.449	167.6251***
_cons	1.030.004	-2.950.994
Metode	FGLS	FGLS
Prob (chi2)	0,00	0,00
BP-LM Test (chi2)	0,7424	0,2263
Total Panel Obs.	135	135

Keterangan: * signifikan pada taraf 10%
 ** signifikan pada taraf 5%
 *** signifikan pada taraf 1%